

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Di Kabupaten Jombang

Abdurrohman Addakhil¹, Machwal Huda², Farichatun Nisa³

^{1 2 3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

Email: aabdurrohman977@gmail.com , machwalhuda65@gmail.com, nisa.farichatun@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Impelementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Jombang, di latarbelakangi oleh tingginya risiko bencana kebakaran di wilayah tersebut. Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang menjadi fokus penelitian karena urgensi penanganan masalah bencana kebakaran ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C Edward III, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan hasil implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang memiliki potensi besar dalam menangani bencana kebakaran, didukung oleh komitmen dan profesionalisme personalnya serta prosedur operasional yang jelas. Namun, untuk mencapai efektivitas dan kapasitas optimal sejalan dengan persyaratan kebijakan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, ada beberapa kebutuhan mendesak untuk perbaikan signifikan dalam alokasi dan pengelolaan sumber daya, termasuk peralatan modern, dana, dan personel. Tanpa dukungan yang memadai untuk sumber daya ini, penerapan kebijakan implementasi akan menghadapi tantangan yang signifikan. Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Jombang menunjukkan kesadaran dan kemauan yang tinggi untuk ikut serta dalam pencegahan bencana kebakaran, mengapresiasi kemudahan pelaporan dan koordinasi antar instansi terkait. Meskipun demikian, penambahan dan pemeliharaan fasilitas tanggap bencana kebakaran di tingkat masyarakat tetap penting untuk memastikan masyarakat merasa lebih aman dan lebih siap menghadapi potensi bencana kebakaran.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Penanggulangan bencana kebakaran, Kabupaten Jombang, Sumber daya, Peran masyarakat

ABSTRACT

This study examines the implementation of fire disaster mitigation policies in Jombang Regency, driven by the high risk of fire disasters in the area. The Jombang Regency Fire Department is the focus of this research due to the urgency of addressing fire disaster issues. This study employs a qualitative method and utilizes George C. Edward III's policy implementation theory. The aim is to analyze the process and outcomes of fire disaster mitigation policy implementation in Jombang Regency. The findings indicate that the Jombang Regency Fire Department possesses significant potential in addressing fire disasters, supported by the commitment and professionalism of its personnel as well as clear operational procedures. However, to achieve optimal effectiveness and capacity in line with policy requirements and the growing needs of the community, there are urgent needs for significant improvements in resource allocation and management, including modern equipment, funding, and personnel. Without adequate support for these resources, the implementation of policies will face significant challenges. On the other hand, the community of Jombang Regency demonstrates high awareness and willingness to participate in fire disaster prevention, appreciating the ease of reporting and coordination among relevant agencies. Nevertheless, the addition and maintenance of fire disaster response facilities at the community level remain important to ensure that the community feels safer and more prepared to face potential fire disasters.

Keywords: Policy implementation, Fire disaster mitigation, Jombang Regency, Resources, Community role

PENDAHULUAN

BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, mengevaluasi kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, terutama kebakaran, masih rendah. Bahkan banyak warga cenderung meremehkan potensi yang ada. Habibi, Analisis Kebakaran Ahli Pertama, BPBD Jawa Timur mengungkapkan, hampir 90 persen kasus kebakaran disebabkan oleh kelalaian manusia, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Padahal, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sangat penting karena dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan (dikutip dalam rri.co.id, Hermawan, 2025). Dari penjelasan bencana kebakaran yang ada di Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa, penyebab bencana kebakaran di Jawa Timur umumnya sama yaitu dominasi faktor manusia. Kebakaran hutan seringkali dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan atau kelalaian. Sementara itu, kebakaran perkotaan seringkali disebabkan oleh korsleting listrik atau kelalaian saat menggunakan api di rumah atau tempat usaha. Kondisi lingkungan seperti musim kemarau panjang dan angin kencang juga dapat memperburuk risiko penyerapan api.

Terjadi peningkatan drastis frekuensi kebakaran di Kabupaten Jombang, yang menyebabkan masalah signifikan bagi pesatnya perkembangan ekonomi dan industri di wilayah tersebut. Dalam tiga bulan terakhir, telah terjadi 74 kejadian kebakaran di berbagai wilayah, menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang. Seorang pejabat dari kantor Bupati Jombang, Drs. Teguh Narutomo, M.M., dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan dan informasi publik tentang langkah-langkah pencegahan yang tepat merupakan penyebab utama sebagian besar kebakaran. Masalah lainnya adalah masyarakat di sekitar tidak tahu cara menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (Jombangkab.go.id/, 2024). Hubungan arus pendek listrik, kebocoran gas, dan penggunaan bahan mudah terbakar merupakan beberapa penyebab kebakaran yang perlu dipelajari oleh peserta selama sosialisasi. Peserta juga menerima instruksi tentang cara menggunakan APAR dan apa yang harus dilakukan jika terjadi evakuasi. Mempertahankan langkah-langkah proteksi kebakaran yang efektif, termasuk edukasi publik dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan, merupakan prioritas utama bagi pemerintah Kabupaten Jombang (dikutip dalam Jombangkab.go.id/, 2024). Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang dibentuk sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Pembentukan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang dilakukan untuk mengoordinasikan upaya penanggulangan bencana di wilayah tersebut dan melindungi masyarakat serta aset publik dari risiko bencana. Dimulai dari pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana, koordinasi dan kerjasama.

Peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)) memberikan landasan hukum fundamental yang mendasari sistem penanggulangan bencana. Lebih lanjut, penanggulangan bencana harus bersifat menyeluruh (holistik) mengingat sifat kejadiannya. Dengan demikian, penanggulangan bencana merupakan strategi yang menyeluruh, bukan parsial. Menurut kerangka kebijakan penanggulangan bencana, bencana melibatkan banyak pihak. Metode pentahelix berawal dari gagasan penanggulangan bencana sebagai urusan multipihak yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media (Shalih & Nugroho, 2021). Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Jombang sepakat bahwa pendekatan pentahelix atau multiple-helix—yang melibatkan akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media—merupakan cara terbaik untuk mengakomodasi keterlibatan semua pihak melalui mekanisme koordinasi dan kolaborasi

(collaborative governance). Meskipun demikian, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa tetap menjadi penanggung jawab utama, sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Menurut Sharih dan Nugroho (2021), terdapat tiga fase berbeda dalam pelaksanaan penanggulangan bencana: prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Secara keseluruhan, sistem penanggulangan bencana merupakan seperangkat gagasan yang saling terkait yang mencakup hal-hal seperti regulasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, kebijakan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan penanggulangan bencana secara nyata. Mengingat tingginya risiko bencana di Indonesia, sistem penanggulangan bencana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 harus diterapkan secara nasional (Shalih & Nugroho, 2021).

Ketertarikan penulis untuk meneliti Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Jombang berawal dari keprihatinan terhadap tingginya risiko bencana Kebakaran di Kabupaten Jombang (kebakaran lahan dan hutan). Kabupaten Jombang menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penulis memilih fokus pada implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran karena implementasi kebijakan merupakan landasan penting dalam upaya mengurangi risiko dan dampak bencana kebakaran. Kebijakan yang baik mampu mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Selain itu, penulis juga tertarik untuk meneliti Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam penanggulangi bencana kebakaran. Damkar tidak hanya berperan dalam penanganan kebakaran, tetapi juga memiliki peran penting dalam penyelamatan korban bencana lainnya. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tanggap bencana, dan darurat dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran. Masih minimnya penelitian yang berfokus pada fungsi pemadam kebakaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Jombang, sehingga penelitian ini menjadi semakin penting. Efektivitas penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Jombang dapat ditingkatkan dengan pemahaman yang komprehensif tentang aturan dan fungsi Pemadam Kebakaran.

METODE

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif mencakup beragam pendekatan, termasuk wawancara mendalam, observasi partisipan, dan diskusi kelompok terfokus. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang didasarkan pada karakteristik permasalahan. Agar dapat mengandalkan data deskriptif, metode deskriptif ini melihat gambaran besar, interaksi partisipan, dan data yang dikumpulkan langsung dari partisipan.

Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan rinci tentang perspektif Dinas Pemadam Kebakaran Jombang terhadap implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Jombang. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder akan diperoleh dari artikel, jurnal, dan laporan. Observasi dan wawancara dengan warga masyarakat dan Kepala Koordinator sekaligus Komandan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang, masing-masing Bapak Mashudi dan Bapak Ronaldo, menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari publikasi-publikasi yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal dan makalah.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Kebijakan penanggulangan bencana kebakaran adalah suatu hal yang penting bagi Kabupaten Jombang bukan sekedar formalitas melainkan sebuah kebutuhan yang berakar pada kondisi dan potensi ancaman di wilayah Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang memiliki risiko kebakaran yang tidak bisa di abaikan. Berbagai karakteristik di daerah Kabupaten Jombang mulai dari permukiman padat penduduk di daerah perkotaan yang rentan terhadap penyebaran api cepat, hingga sektor industri dan perdagangan yang menyimpan material mudah terbakar, semua hal tersebut menciptakan potensi kebakaran yang tinggi. Di daerah Kabupaten Jombang juga terdapat area pertanian dan perhutanan yang luas yang dapat terjadinya rentan kebakaran lahan dan hutan, terutama saat musim kemarau panjang, dan jika melakukan pembakaran lahan tanpa pengawasan. Pemicu umum seperti korsleting listrik dan kelalaian manusia juga menambah daftar potensi insiden yang perlu di waspadai.

Hasil wawancara dengan Kepala Koordinator Pos Pemadam Kebakaran dan Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang, bahwa Pemadam Kebakaran Jombang memiliki potensi besar dalam penanggulangan bencana kebakaran yang di dukung oleh komitmen dan profesionalisme tinggi personelnnya serta prosedur operasional yang jelas. Namun, untuk mencapai efektivitas dan kapasitas yang optimal sesuai dengan tuntutan kebijakan dan kebutuhan masyarakat Jombang yang terus berkembang, peningkatan yang substansial dalam alokasi dan pengelolaan sumber daya (peralatan modern, dana, dan personel) adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, bahkan dengan semangat tinggi, implementasi kebijakan akan selalu menghadapi kendala yang signifikan.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat sekitar Jombang mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang disimpulkan bahwa, secara keseluruhan masyarakat Kabupaten Jombang menunjukkan kesadaran dan kemauan kuat untuk terlibat dalam penanggulangan bencana kebakaran. Masyarakat mengapresiasi kemudahan pelaporan dan koordinasi antar instansi yang terlihat di lapangan. Namun, perlunya penambahan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di tingkat lingkungan masyarakat menjadi hal yang penting agar masyarakat merasa lebih aman dan siap menghadapi potensi bencana kebakaran.

Bahwa secara keseluruhan implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Jombang menunjukkan potensi kuat yang di dorong oleh komitmen tinggi personel Pemadam Kebakaran dan kesadaran masyarakat. Aspek Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi menunjukkan keselarasan yang cukup baik dengan teori implementasi Edward III, terbukti dari prosedur yang jelas, semangat kerja yang tinggi, dan koordinasi antar pihak atau instansi pemerintah.

Namun, kesenjangan paling signifikan dan menjadi penghambat utama efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran Kabupaten Jombang adalah pada aspek Sumber Daya. Keterbatasan dana, peralatan, dan personel secara langsung mempengaruhi Pemadam Kebakaran untuk bertindak secara optimal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran yang ideal sesuai teori Edward III dan mencapai tingkat penanggulangan bencana kebakaran yang lebih efektif, investasi dan peningkatan substansial pada ketersediaan sumber daya menjadi prioritas utama yang harus segera di tangani.

Tabel 1
Hasil Wawancara

INFORMAN	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN
Koordinator Pos Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang	Komunikasi	1. Bagaimana upaya Anda dalam menyampaikan informasi mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran kepada seluruh anggota tim pemadam kebakaran dan pihak terkait lainnya?	Untuk memastikan informasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran tersampaikan secara efektif kepada seluruh anggota tim Pemadam Kebakaran Jombang ada beberapa upaya yaitu: Rapat dan apel rutin (informasi di sampaikan secara langsung dalam rapat internal), Gup komunikasi internal (pemanfaatan platform komunikasi digital untuk diseminasi cepat informasi penting), Penyebaran dokumen resmi (ditempatkan di lokasi yang mudah diakses seluruh anggota). Untuk pihak terkait lainnya seperti BPBD, Kepolisian, TNI, atau relawan koordinasi melalui rapat koordinasi sektoral, simulasi bersama, atau penyampaian informasi melalui surat resmi dan pertemuan formal.
	Sumber Daya	2. Apakah Anda merasa sumber daya (dana, peralatan, dan personel) yang tersedia saat ini di pemadam kebakaran Jombang sudah memadai untuk mendukung implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran secara efektif di wilayah Kabupaten Jombang?	Sumber daya (dana, peralatan, dan personel) di Pemadam Kebakaran Jombang saat ini kurang. Seperti keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Jombang, peralatan yang kurang lengkap, dan alokasi dana yang terbatas.
	Disposisi	3. Apakah anggota tim pemadam kebakaran Jombang memiliki komitmen yang tinggi dan tanggap untuk merespons bencana kebakaran di Kabupaten Jombang?	Ya, anggota tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang memiliki komitmen yang tinggi dan sangat tanggap dalam merespons bencana kebakaran di Kabupaten Jombang. Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya, tim anggota pemadam kebakaran selalu siap 24 jam.
	Struktur Birokrasi	4. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang dalam tim pemadam	Sudah cukup jelas seperti, Komandan regu (memimpin operasi di lapangan, mengambil keputusan, dan

		kebakaran terkait implementasi kebijakan penanggulangan bencana, apakah sudah jelas dan efisien?	bertanggung jawab atas keselamatan tim serta keberhasilan penanganan bencana), Anggota regu (operator pompa, pemadaman, penyelamat, driver), Petugas Komunikasi/Piket (menerima laporan, mengkoordinasikan respons, meneruskan informasi ke regu yang bertugas. Kepala Koordinator Pos (koordinasi antar instansi, penyediaan dan pengelolaan sumber daya). Namun untuk efisensi terkendala oleh keterbatasan personel, jadi memaksa anggota untuk merangkap tugas atau menyesuaikan peran di lapangan.
Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang	Komunikasi	1. Seberapa sering koordinasi atau rapat rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Jombang?	Dilakukan secara berkala, baik mingguan maupun bulanan, dan juga koordinasi insidental/mendadak. Tujuan dari koordinasi atau rapat untuk memastikan seluruh anggota tim selalu selaras dengan kebijakan yang berlaku dan siap menghadapi berbagai scenario bencana.
	Sumber Daya	2. Apakah personel pemadam kebakaran Kabupaten Jombang memiliki pelatihan dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan yang berlaku?	Ya, secara umum personel pemadam Pemadam Kebakaran Jombang memiliki pelatihan dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas sesuai kebijakan yang berlaku. Para personel rutin mengikuti pelatihan dasar dan lanjutan, termasuk teknik pemadaman, penyelamatan, pertolongan pertama dan penggunaan peralatan khusus. Pelatihan ini diselenggarakan baik secara internal maupun dengan dukungan lembaga terkait.
	Disposisi	3. Apa saja faktor-faktor yang menurut Anda dapat mempengaruhi semangat kerja atau kesediaan anggota tim untuk beradaptasi jika adanya perubahan kebijakan?	Beberapa faktor utama yang mempengaruhi semangat kerja dan kesediaan anggota tim pemadam Kebakaran Jombang untuk beradaptasi jika adanya perubahan kebijakan yaitu: Kejelasan komunikasi (Seberapa jelas informasi mengenai kebijakan baru), Dukungan pimpinan (peran aktif atasan dalam menjelaskan dan memfasilitasi), Ketersediaan Sumber Daya (alat dan pelatihan yang memadai), Manfaat nyata (Kebijakan baru membawa keuntungan bagi anggota atau individu), Partisipasi (kesempatan bagi

			anggota untuk memberi masukan).
	Struktur Birokrasi	4. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap tahapan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Jombang?	Ya, ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap tahapan penanggulangan bencana kebakaran di Pemadam Kebakaran Jombang. SOP ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penerimaan laporan, persiapan dan keberangkatan tim, teknik pemadaman, penyelamatan korban, hingga proses pendinginan dan pendataan pasca-kejadian. SOP ini dirancang untuk memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan aman sesuai standar operasional yang berlaku.
Masyarakat Sekitar	Komunikasi	1. Bagaimana Anda biasanya menerima informasi mengenai kebijakan atau prosedur penanggulangan bencana kebakaran dari pemerintah atau pihak pemadam kebakaran?	Kami biasanya menerima informasi kebijakan atau prosedur penanggulangan bencana kebakaran dengan adanya sosialisasi langsung di permukiman dan sekolah atau perkantoran, lebih mudah informasi dari Media Sosial dan Situs Web.
	Sumber Daya	2. Dalam situasi darurat kebakaran, apakah Anda merasa mudah untuk mengakses bantuan atau sumber daya dari pihak Pemadam Kebakaran di wilayah Jombang ini?	Ya, secara umum kami sebagai masyarakat Jombang merasa cukup mudah untuk mengakses bantuan atau sumber daya dari pihak Pemadam Kebakaran dalam situasi darurat kebakaran. Karena adanya nomor darurat tunggal (seperti 112 atau nomor langsung Pemadam kebakaran) yang mudah di hubungi. Respon dari pihak Pemadam Kebakaran juga dinilai cepat saat menerima laporan. Hanya saja karena kondisi lalu lintas atau aksesibilitas jalan di beberapa daerah Jombang menjadi penghaambat respons yang lebih cepat.
	Disposisi	3. Bagaimana Anda sebagai masyarakat Jombang memastikan bahwa seluruh anggota tim Pemadam Kebakaran memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana kebakaran?	Ya, secara keseluruhan para masyarakat Kabupaten Jombang menilai komitmen dan motivasi tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang dari kinerja nyata dan sikap mereka di lapangan saat menjalankan tugas penanggulangan bencana kebakaran dengan baik.

	Struktur Birokrasi	4. Menurut pengamatan Anda sebagai masyarakat Jombang, apakah ada koordinasi yang baik antara berbagai pihak instansi pemerintah (misalnya Pemadam Kebakaran, BPBD, Kepolisian) dalam penanganan bencana kebakaran?	Ya, menurut pengamatan dari kami koordinasi antara Pemadam Kebakaran, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Kepolisian, dan Instansi terkait lainnya dalam penanganan bencana kebakaran umumnya sudah berjalan cukup baik. Masyarakat sekitar juga melihat dari instansi lainnya hadir dan bekerjasama di lokasi kejadian. Hal ini mengindikasikan adanya komunikasi dan pembagian peran yang terkoordinasi di lapangan.
--	--------------------	---	--

Sumber: data diolah, 2025



Gambar 1.1

Wawancara dengan Kepala Koordinator Pos dan Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang.



Gambar 2.2

Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Jombang

SIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Jombang, ditinjau melalui 4 faktor menurut teori George C Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi), dari hasil mengungkapkan bahwa efektivitas implementasi sangat didorong oleh komitmen kuat personel Pemadam Kebakaran dan partisipasi masyarakat, namun secara signifikan terhambat oleh keterbatasan sumber daya.

- 1) Komunikasi, menunjukkan bahwa Pemadam Kebakaran Jombang telah memiliki sistem yang terstruktur untuk penyempaian informasi, baik secara internal melalui rapat rutin dan grup komunikasi, maupun eksternal melalui sosialisasi dan media massa. Frekuensi koordinasi dianggap memadai. Namun, dari perspektif masyarakat masih ada harapan akan peningkatan konsistensi dan relevansi informasi agar lebih mudah dipahami dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
- 2) Sumber Daya, menjadi tantangan paling signifikan dalam implementasi kebijakan. Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang mengakui adanya kekurangan dana, peralatan modern yang terbatas, dan jumlah personel yang belum memadai untuk mencakup wilayah Kabupaten Jombang. Pengamatan masyarakat juga sejalan menunjukkan bahwa fasilitas penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan masyarakat masih perlu di tingkatkan. Kesenjangan ini secara langsung membatasi kapasitas dan efektivitas respons di lapangan.
- 3) Disposisi, baik personel Pemadam Kebakaran maupun masyarakat Kabupaten Jombang menunjukkan komitmen dan motivasi yang sangat tinggi. Personel Pemadam Kebakaran Jombang siap siaga 24 jam dan berdedikasi penuh meskipun keterbatasan personel, sementara masyarakat menunjukkan kesadaran dan kesediaan kuat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pelatihan atau simulasi. Komitmen bersama ini menjadi hal berharga dalam penanggulangan bencana kebakaran di Jombang.
- 4) Struktur Birokrasi, dalam hasil menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanggulangan bencana kebakaran sudah jelas, dengan pembagian tugas dan wewenang yang terdefinisi. Masyarakat juga merasa prosedur pelaporan mudah dan mengamati adanya koordinasi yang cukup baik antar instansi di lapangan. Namun, efisiensi operasional terpengaruh oleh keterbatasan personel yang harus merangkap tugas, mengindikasikan bahwa meskipun prosedur ada implementasinya dapat terhambat oleh faktor sumber daya yang kurang.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Jombang berada dalam kondisi dilematis dimana semangat dan dedikasi personel serta kesadaran masyarakat tinggi, dan didukung oleh kerja birokrasi yang relatif jelas. Namun, kurang signifikan dalam sumber daya material dan personel secara fundamental membatasi kapasitas respons dan efektivitas implementasi secara menyeluruh. Tanpa peningkatan signifikan pada aspek sumber daya, optimalisasi kebijakan akan tetap menjadi tantangan, meskipun prosedur telah ada.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kepada pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per-satu, juga penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhingga, karena dengan bantuan Bapak dan Ibu semuanya maka penelitian ini dapat diselesaikan penulisannya dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian bagi kejayaan Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Jombangkab.go.id/. (2024). *Kebakaran Marak di Jombang, sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran di gelar*. <https://www.jombangkab.go.id/berita/umum/kebakaran-marak-di-jombang-sosialisasi-pencegahan-bahaya-kebakaran-digelar-10980>
- rri.co.id, Hermawan, B. (2025). *BPBD Jatim Soroti Rendahnya Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Kebakaran*. <https://www.rri.co.id/>.
<https://www.rri.co.id/surabaya/daerah/1575645/bpbd-jatim-soroti-rendahnya-kesiapsiagaan-masyarakat-hadapi-kebakaran>
- Shalih, O., & Nugroho, R. (2021). Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Cakrawala*, 15(2), 124–138. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.379>